

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi.

3. Fungsi :

- a. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
- f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi;
- g. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1 Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	-	Hasil Penilaian dari Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera
			2.1 Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.1.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	1. Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Sesuai Target 2. Persentase Perkara yang Menyangkut Kepentingan Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Dimenangkan dan Pelayanan Komunitas Masyarakat sesuai Target	Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Hukum dan HAM	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
			3.1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	3.1.1 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%))	-	Hasil Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
			3.1.2 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	Jumlah Laporan Pelayanan Kehumasan KDH/WKDH/Jumlah Laporan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH x 100	Laporan Data Informasi Urusan Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Komisi Informasi Pusat	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan	
			3.1.3 Indeks Reformasi Birokrasi	-	Hasil Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			4.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas(Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	4.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai Rata-rata (NRR) SKM Perangkat/Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM	Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
			5.1 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	5.1.1 Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Rencana dan Target	Jumlah Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumsel yang Direncanakan / Jumlah Pagu Anggaran Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD x 100	Laporan Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumsel ke Biro Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
			6.1 Meningkatnya Kordinasi Pelaksanaan Pembangunan	6.1.1 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa pada tahun bersangkutan x 100	Laporan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
				6.1.2 Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa pada tahun bersangkutan x 100	Laporan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
			7.1 Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	7.1.1 Jumlah Pemekaran kecamatan yang Difasilitasi	Jumlah Kab/Kota pemekaran yang di fasilitasi	Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
				7.1.2 Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	∑ Pilar yang difasilitasi	Laporan Evaluasi Daerah Otonomi Baru Sumatera Selatan	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
				7.1.3 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BU MN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.	Jumlah MoU pada tahun bersangkutan	Naskah Kerjasama MOU	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
			8.1 Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	8.1.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	Jumlah Program dan Kegiatan yang Terlaksana / Jumlah Target Program dan Kegiatan x 100	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perekonomian	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
				8.1.2 Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	Jumlah PAD BUMD yang diterima / Jumlah Target PAD BUMD x 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan BUMD	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
			9.1 Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	9.1.1 Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan sebagai Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat/Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun x 100%	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			10.1 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	10.1.1 Meningkatkan Peringkat MTQ	Jumlah Peserta	Laporan Data	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
				10.1.2 Meningkatkan Peringkat STQ	Jumlah Peserta	Laporan Data	
			11.1 Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	11.1.1 Persentase PD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PD yang telah memiliki Struktur Organisasi/seluruh PD x 100	Dokumen Usulan Perbaikan Struktur Organisasi di Sekretariat Daerah	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
				11.1.2 Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	Jumlah PD yang menerapkan analisa jabatan dan analisis beban kerja/Seluruh PD x 100	Laporan Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja di Sekretariat Daerah	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
				11.1.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah data yang di input/Jumlah 6 Urusan Bidang x 100	Dokumen 6 Urusan Perangkat Daerah	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera
				11.1.4 Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel.	Jumlah Kehadiran Disekretariat Daerah / Jumlah pegawai x 100	Laporan Kehadiran Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
				11.1.5 Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia / Total sarana dan prasarana yang diperlukan x 100	Daftar Inventaris Barang di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel

a.n. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007